

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan juga diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (DiMaggio, 2019). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Idealnya pembangunan dilaksanakan secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang dalam keberhasilannya dapat diukur dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kualitas hidup manusia.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur utama dalam mengevaluasi pembangunan karena mencerminkan kapasitas ekonomi suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang berlangsung dalam jangka panjang (Firmansyah, 2021). Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya (Muslihatinningsih et al., 2023). Berbagai cara telah digunakan oleh manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Masyarakat atau negara memiliki peran yang sangat krusial dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendasar (Hidayatullah & Ulfi, 2021). Negara bertindak sebagai pengatur dan penyedia layanan, sementara masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi. Kolaborasi yang harmonis antara keduanya diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak dibarengi dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah atau daerah menyebabkan tujuan negara tidak dapat terwujud (Sinring & Hamid, 2020). Perbedaan potensi daerah yang ada di Indonesia baik secara geografis maupun sumber daya alamnya, mengakibatkan berbagai daerah memiliki potensi khas yang apabila dimanfaatkan dengan baik, daerah tersebut maju dan makmur. (Mandey et al., 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini menunjukkan dominasi sektor industri dan jasa di kota-kota tersebut, sementara daerah pedesaan lebih banyak bergantung pada sektor pertanian yang pertumbuhannya relatif lebih lambat. Akibatnya, daerah pedesaan mengalami kesenjangan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Adapun pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten/Kota Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Wilayah Jawa Timur	Tahun		
	2021	2022	2023
Kabupaten Pacitan	2.49	5.54	4.46
Kabupaten Ponorogo	3.19	3.24	5.14
Kabupaten Trenggalek	3.65	4.52	4.92
Kabupaten Tulungagung	3.53	5.22	4.91
Kabupaten Blitar	3.02	5.20	4.45
Kabupaten Kediri	3.06	4.90	4.53
Kabupaten Malang	3.12	5.13	5.00
Kabupaten Lumajang	3.14	4.43	5.00
Kabupaten Jember	4.00	4.53	4.93
Kabupaten Banyuwangi	4.08	4.43	5.03
Kabupaten Bondowoso	3.49	3.51	4.62
Kabupaten Situbondo	3.26	4.39	4.90
Kabupaten Probolinggo	3.35	4.52	4.73
Kabupaten Pasuruan	4.34	5.32	5.21
Kabupaten Sidoarjo	4.21	7.53	6.16
Kabupaten Mojokerto	4.12	5.82	5.15
Kabupaten Jombang	3.24	5.37	5.04
Kabupaten Nganjuk	3.61	4.84	5.40
Kabupaten Madiun	3.34	4.32	5.12
Kabupaten Magetan	3.04	3.89	4.47
Kabupaten Ngawi	2.55	3.19	4.49
Kabupaten Bojonegoro	-5.54	-6.16	2.47
Kabupaten Tuban	3.00	8.88	4.36
Kabupaten Lamongan	3.43	5.56	4.28
Kabupaten Gresik	3.79	7.38	4.62
Kabupaten Bangkalan	-2.07	-1.12	1.20
Kabupaten Sampang	0.22	2.31	2.56
Kabupaten Pamekasan	3.41	4.66	4.96
Kabupaten Sumenep	2.61	3.11	5.35
Kota Kediri	2.50	3.95	1.92
Kota Blitar	4.28	5.22	5.29
Kota Malang	4.21	6.32	6.07
Kota Probolinggo	4.06	6.12	6.04
Kota Pasuruan	3.64	6.22	5.65

Wilayah Jawa Timur	Tahun		
	2021	2022	2023
Kota Mojokerto	3.65	5.56	2.79
Kota Madiun	4.73	5.52	5.80
Kota Surabaya	4.29	6.51	5.70
Kota Batu	4.04	6.18	6.19
<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>3.57</b>	<b>5.34</b>	<b>4.95</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Jawa Timur terdiri 27 Kabupaten dan 9 Kota. Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,40 yang artinya mengalami peningkatan dalam aktivitas ekonominya. Namun, terdapat wilayah di Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, yakni Kabupaten Bangkalan - 2,07 (2021) dan Kabupaten Bojonegoro -6,16 (2022). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk pandemi dan penurunan produksi lokal. Pada tahun 2023 seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yang tentunya mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Stabilitas ekonomi dapat diwujudkan dengan mempraktikkan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah 279 :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Q.S Albaqarah :29).”

Pertumbuhan ekonomi yang kuat seringkali dapat membawa peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Tentunya hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena lebih banyak orang memiliki akses ke pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dewasa ini masalah kemiskinan menjadi lebih kompleks, dimana dimensi kemiskinan mencakup permasalahan adanya kerentanan, ketidakberdayaan serta ketidakmampuan dalam menyampaikan informasi. Hal ini menjadikan kemiskinan menjadi lebih multidimensi dalam masyarakat. Kemiskinan juga dianggap sebagai ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan kekuatan sosial. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami fluktuasi. Berikut jumlah kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

**Tabel 1. 2 Jumlah Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur**

Kab/Kota	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pacitan	78.64	75.86	80.82	84.19	76.93	76.20
Ponorogo	90.22	83.97	86.74	89.94	81.80	83.71
Trenggalek	83.50	76.44	81.06	84.89	76.75	74.58
Tulungagung	75.23	70.01	76.40	78.59	70.52	68.81
Blitar	112.40	103.75	108.55	112.62	101.94	101.94
Kediri	177.20	163.95	179.93	184.49	169.46	171.18
Malang	268.49	246.60	265.56	276.58	252.88	251.36
Lumajang	103.69	98.88	102.60	105.25	95.04	93.82
Jember	243.42	226.57	247.99	257.09	232.73	236.46
Banyuwangi	125.50	121.37	130.37	130.93	122.01	119.52
Bondowoso	110.98	103.33	110.24	115.18	105.69	105.13
Situbondo	80.27	76.44	83.74	86.95	81.46	82.62
Probolinggo	217.06	207.22	218.35	223.32	203.23	205.02
Pasuruan	152.48	141.09	151.43	159.78	148.62	154.09
Sidoarjo	125.75	119.29	127.05	137.15	125.69	119.15

Kab/Kota	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mojokerto	111.55	108.81	118.80	120.54	111.03	112.86
Jombang	120.19	116.44	125.94	127.30	115.48	117.36
Nganjuk	127.28	118.51	122.73	125.53	113.63	115.86
Madiun	77.75	71.91	78.30	81.61	74.07	75.87
Magetan	64.86	60.43	65.09	67.75	62.65	62.49
Ngawi	123.09	119.43	128.19	130.81	119.02	121.30
Bojonegoro	163.94	154.64	161.10	166.52	153.40	153.25
Tuban	178.64	170.80	187.13	192.58	178.05	177.25
Lamongan	164.00	157.11	164.68	166.82	151.08	149.94
Gresik	154.02	148.61	164.05	166.35	149.64	149.75
Bangkalan	191.33	186.11	204.00	215.97	196.11	196.66
Sampang	204.82	202.21	224.74	237.23	217.97	221.71
Pamekasan	125.76	122.43	129.41	137.12	126.02	126.43
Sumenep	218.60	211.98	220.23	224.73	206.20	206.10
Kota Kediri	21.90	20.54	22.19	22.55	21.15	21.03
Kota Blitar	10.47	10.10	11.10	11.33	10.65	10.61
Kota Malang	35.49	35.39	38.77	40.62	38.56	37.78
Kota Probolinggo	16.90	16.37	17.72	17.91	16.16	15.86
Kota Pasuruan	13.45	12.92	13.40	13.97	13.02	13.56
Kota Mojokerto	7.04	6.63	8.09	8.37	7.88	7.65
Kota Madiun	7.92	7.69	8.83	9.06	8.49	8.46
Kota Surabaya	140.81	130.55	145.67	152.49	138.21	136.37
Kota Batu	7.98	7.89	8.12	8.63	8.05	7.10
Jawa Timur	4332.59	4112.25	4419.10	4572.73	4181.29	4188.81

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa garis kemiskinan di Jawa Timur sangat fluktuatif dimana pada tahun 2018 sebesar 4332,59 lalu menurun di menjadi 4112,25 di tahun 2019 kemudian meningkat lagi pada tahun 2020 dan 2021 yakni 4419,10 dan 4572,73 lalu turun pada tahun 2022 yakni 4181,29 dan naik lagi pada tahun 2023 yakni 4188,81 ribu jiwa. Pada tahun 2023 daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Malang sebanyak 251,36 ribu jiwa, sementara daerah paling rendah adalah Kota Batu sebanyak 7,10 ribu jiwa.

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak selalu bersifat linier. Terkadang pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak selalu secara otomatis mengarah pada penurunan tingkat kemiskinan jika manfaatnya tidak tersebar merata atau jika struktur ekonomi tidak inklusif. Kemiskinan dapat mengalami fluktuasi dalam jangka pendek atau jangka panjang karena berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor tersebut dapat berupa perubahan ekonomi, perubahan kebijakan, perubahan lingkungan, dan perubahan demografis.

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang harus diatasi dalam proses pembangunan. Sebab kemiskinan dapat membatasi akses individu terhadap sumber daya dan peluang, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan akses ke pasar. Hal ini menghambat potensi manusia untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Kemiskinan dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika sebagian besar populasi berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, konsumsi dan investasi mungkin terhambat, serta mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi.

Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan perlu harus menjauhi praktik-pratik buruk yang tidak berkeadilan dan melakukan segala sesuatu dengan cara *halal* dan *thayyib*. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah:168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Prinsip halal dalam ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil. Ini meliputi larangan terhadap praktik riba, bisnis yang tidak etis seperti penipuan, kecurangan, dan eksploitasi. Islam mendorong seseorang melakukan zakat, infak, dan sedekah. Dengan distribusi kekayaan yang lebih adil ini membantu mengurangi kemiskinan dengan memastikan bahwa sumber daya didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan.

Selain kemiskinan angka pengangguran juga perlu diperhatikan dalam pembangunan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang memenuhi kriteria tertentu tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Hal ini bisa menjadi masalah serius dalam konteks pembangunan karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan sosial.

Tingginya tingkat pengangguran bisa menandakan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja, serta masalah struktural dalam perekonomian. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu perekonomian. Ini bisa menjadi tanda bahwa pertumbuhan ekonomi terganggu atau tidak berjalan pada kapasitas penuhnya. Adapun tingkat pengangguran di Jawa timur selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Timur**

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Pacitan	1.39	0.91	2.28	2.04	3.65	1.83
Kabupaten Ponorogo	3.77	3.50	4.45	4.38	5.51	4.66
Kabupaten Trenggalek	4.12	3.36	4.11	3.53	5.37	4.52
Kabupaten Tulungagung	2.53	3.29	4.61	4.91	6.65	5.65
Kabupaten Blitar	3.38	3.05	3.82	3.66	5.45	4.91
Kabupaten Kediri	4.15	3.58	5.24	5.15	6.83	5.79
Kabupaten Malang	3.15	3.70	5.49	5.40	6.57	5.70
Kabupaten Lumajang	2.46	2.73	3.36	3.51	4.97	3.67
Kabupaten Jember	4.01	3.69	5.12	5.44	4.06	4.01
Kabupaten Banyuwangi	3.59	3.95	5.34	5.42	5.26	4.75
Kabupaten Bondowoso	3.84	2.86	4.13	4.46	4.32	4.15
Kabupaten Situbondo	1.85	2.77	3.85	3.68	3.38	3.27
Kabupaten Probolinggo	4.00	3.77	4.86	4.55	3.25	3.24
Kabupaten Pasuruan	5.94	5.22	6.24	6.03	5.91	5.48
Kabupaten Sidoarjo	4.62	4.62	10.97	10.87	8.80	8.05
Kabupaten Mojokerto	4.21	3.61	5.75	5.54	4.83	4.67
Kabupaten Jombang	4.56	4.28	7.48	7.09	5.47	4.66
Kabupaten Nganjuk	2.60	3.16	4.80	4.98	4.74	4.68
Kabupaten Madiun	3.71	3.52	4.80	4.99	5.84	5.14
Kabupaten Magetan	3.82	2.98	3.74	3.86	4.33	4.16
Kabupaten Ngawi	3.75	3.60	5.44	4.25	2.48	2.41
Kabupaten Bojonegoro	4.11	3.56	4.92	4.82	4.69	4.63
Kabupaten Tuban	2.76	2.70	4.81	4.68	4.54	4.40
Kabupaten Lamongan	3.10	3.89	5.13	4.90	6.05	5.46
Kabupaten Gresik	5.71	5.40	8.21	8.00	7.84	6.82
Kabupaten Bangkalan	5.09	5.62	8.77	8.07	8.05	6.18
Kabupaten Sampang	2.38	2.71	3.35	3.45	3.11	2.72
Kabupaten Pamekasan	2.88	2.26	3.49	3.10	1.40	1.74
Kabupaten Sumenep	1.75	2.08	2.84	2.31	1.36	1.71
Kota Kediri	3.56	4.15	6.21	6.37	4.38	4.06
Kota Blitar	3.98	4.54	6.68	6.61	5.39	5.24
Kota Malang	6.65	5.88	9.61	9.65	7.66	6.80
Kota Probolinggo	3.56	4.25	6.70	6.55	4.57	4.53
Kota Pasuruan	4.50	4.89	6.33	6.23	6.18	5.64
Kota Mojokerto	2.44	2.63	6.74	6.87	5.05	4.73
Kota Madiun	3.80	3.96	8.32	8.15	6.39	5.85

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Surabaya	6.01	5.76	9.79	9.68	7.62	6.76
Kota Batu	3.07	2.42	5.93	6.57	8.43	4.52
Jawa Timur	3.91	3.82	5.84	5.74	5.49	4.88

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel di atas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur mengalami instabilitas dimana pada tahun 2018 sebesar 3,91% lalu turun menjadi 3,82% di tahun 2019, kemudian naik menjadi 5,84% tahun 2020 lalu turun kembali menjadi 5,74 kemudian terus mengalami penurunan hingga 4,88 di tahun 2023. Daerah dengan tingkat pengangguran paling banyak pada tahun 2023 adalah kabupaten Sidoarjo dengan TPT 8,05%, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Sumenep dengan TPT 1,71%.

Pengangguran cenderung mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat secara tidak merata. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi serta menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan dan sumber daya. Pengangguran tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang serius. Ini dapat meningkatkan tingkat stres, depresi, dan ketidakstabilan mental, serta dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan masyarakat. Pengangguran berarti adanya potensi manusia yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dan dianalisis, baik secara nasional maupun secara regional. Ketimpangan sering terjadi di provinsi itu sendiri,

fokus pembangunan yang hanya pada satu aspek menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Program untuk mengatasi isu yang timbul semacam ketimpangan pembangunan serta ketimpangan antar suatu daerah yang belum memiliki dampak nyata guna mengatasinya sudah diluncurkan. Sampai-sampai kebijakan yang sudah disiapkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi juga tidak memiliki dampak yang baik, dikarenakan juga memiliki kontribusi pada sebuah ketimpangan pembangunan serta ketimpangan wilayah.

Ketimpangan pembangunan dapat dilihat dari berbagai aspek, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran.. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tercapainya pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat ketimpangan pembangunan yang cukup signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu.

Sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Resha Moniyana & Ahmad Dhea Pratama (2020) yang pada penelitiannya menyatakan Hasil keterkaitan spasial Persentase Penduduk Miskin antar Kabupaten/kota di Provinsi Lampung diketahui bernilai Moran's I negatif.

Beberapa penelitian yang di lakukan oleh (Ishak et al., 2020), yang pada penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Seperti dalam penelitian

yang dilakukan oleh (Ersad et al., 2022) menyatakan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan di Sumatera Bagian Selatan.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Malik Ibrahim (2019), yang pada penelitiannya menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan dipengaruhi pengangguran. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Liling Vera Yusica (2018), yang ada penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2023. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pendekatannya yang komprehensif dan fokus temporal yang spesifik.

Banyak penelitian sebelumnya cenderung memisahkan analisis terhadap variabel-variabel seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, dan tidak selalu meninjau dampaknya secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan dalam satu kerangka waktu yang panjang dan terkini. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan menggabungkan ketiga variabel tersebut dan menganalisis pengaruhnya secara bersamaan terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Timur selama hampir satu dekade.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data terbaru hingga tahun 2023, yang memungkinkan evaluasi yang lebih akurat dan relevan terhadap kondisi ekonomi dan sosial terkini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan perspektif holistik tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Timur. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan relevan untuk kebijakan pembangunan yang lebih efektif di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur?
- 2) Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur?
- 3) Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur?
- 4) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan

pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi dan pengembangan dalam memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan

pembangunan dan memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan